

JOURNAL OF EDUCATION

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

Menganalisis Hubungan Antara Struktur Sosial Dan Kekuasaan Dalam Perspektif Ilmu Politik

Nurwahidatul jannah¹, Zarwa ahwani², Suci ramadhani solehah³, Regina adwin⁴

¹²³⁴Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, haeinanaa06@gmail.com

Abstrak: Hubungan antara struktur sosial dan kekuasaan terhadap ilmu politik adalah hubungan yang dinamis dan saling mempengaruhi. Pemahaman tentang hubungan ini sangat penting untuk menganalisis dan memahami berbagai fenomena politik dan sosial, serta kekuasaan, untuk mengembangkan solusi yang efektif bagi masalah-masalah sosial, kekuasaan dan politik yang kompleks. Tujuan penelitian dalam artikel adalah untuk mengeksplorasi bagaimana Hubungan antara struktur sosial, kekuasaan terhadap ilmu politik menganalisis hubungan antara struktur sosial dan kekuasaan dalam perspektif ilmu politik manfaat. Hubungan ini membantu memahami bagaimana kekuasaan mempengaruhi struktur sosial, distribusi sumber daya, dan proses pengambilan keputusan di berbagai level. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Literature Review, yang melibatkan analisis dan tinjauan terhadap jurnal, artikel, dan buku-buku terkait. Menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan publik yang responsif terhadap dinamika sosial dan politik. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini menekankan Hubungan antara struktur sosial, kekuasaan terhadap ilmu politik yang kaitannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini diharapkan dapat menciptakan kesetabilan dalam bermasyarakat khususnya dan dalam bernegara secara umum.

Kata Kunci: Struktur Sosial, Kekuasaan, Ilmu Politik, Stabilitas sosial, Kajian Literatur

Abstract: The relationship between social structure and power to political science is a dynamic and mutually influential relationship. Understanding this relationship is essential to analyze and understand various political and social phenomena, as well as power, to develop effective solutions to complex social, power and political problems. The purpose of the research in the article is to explore how the Relationship between social structure, power to political science analyzes the relationship between social structure and power in the perspective of political science benefits. This relationship helps understand how power affects social structure, distribution of resources, and decision-making processes at various levels. The research method used is the Literature Review method, which involves analysis and review of journals, articles, and related books. Become the basis for consideration in formulating public policies that are responsive to social and political dynamics. The results and discussion of this study emphasize the Relationship between social structure, power to political science which is related to national and state life. This is expected to create stability in society in particular and in the state in general.

Keywords: Social Structure, Power, Political Science, Social Stability, Literature Review

*Correspondence Address: haeinanaa06@gmail.com

Article History	Received	Revised	Published
	31 May 2025	31 May 2025	30 November 2025

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Struktur sosial secara harfiah dapat diartikan sebagai bentuk atau susunan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Kekuasaan adalah kemampuan menggunakan sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik sehingga menguntungkan dirinya, kelompoknya atau masyarakat secara umum. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Politik pun dapat diartikan sebagai ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional.

Ilmu politik dan struktur sosial memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Ilmu politik, sebagai studi tentang kekuasaan dan pengaruh, dipengaruhi oleh struktur sosial yang ada dalam suatu masyarakat, dan pada gilirannya, kebijakan dan proses politik dapat membentuk dan mengubah struktur sosial tersebut. Serta Politik erat kaitannya dengan kekuasaan, negara dan pengaturan hidup bersama dalam upaya mencapai kebaikan bermasyarakat. Aspek penting dari kekuasaan adalah bahwa kekuasaan merupakan fungsi ketergantungan, dan Ketergantungan adalah hubungan A dengan B ketika A memiliki sesuatu yang diperlukan B. Maka dari itu, semakin besar ketergantungan B pada A, semakin besar pula kekuasaan A dalam hubungan itu.

Dalam diskursus ilmu politik modern, pemahaman mendalam mengenai jalinan kompleks antara struktur sosial dan kekuasaan menjadi fondasi krusial untuk menganalisis dinamika politik dalam berbagai konteks. Bagaimana masyarakat terorganisasi secara hierarkis, dengan berbagai lapisan dan kelompok yang memiliki sumber daya dan status yang berbeda, secara inheren memengaruhi bagaimana kekuasaan didistribusikan, dijalankan, dan diperebutkan. Struktur sosial, yang mencakup aspek-aspek seperti kelas sosial, status ekonomi, etnisitas, agama, gender, dan pendidikan, bukanlah sekadar kerangka statis. Sebaliknya, ia merupakan arena dinamis di mana berbagai kelompok berinteraksi, bernegosiasi, dan terkadang berkonflik dalam upaya untuk mempertahankan atau mengubah posisi mereka dalam tatanan kekuasaan.

Kekuasaan, di sisi lain, merupakan konsep multidimensional yang melampaui sekadar kemampuan untuk memerintah atau mengontrol. Dalam konteks ilmu politik, kekuasaan mencakup kemampuan untuk memengaruhi perilaku orang lain, membentuk agenda politik, menentukan alokasi sumber daya, dan bahkan menanamkan ideologi dan nilai-nilai yang mendasari legitimasi suatu sistem politik. Kekuasaan tidak hanya bersemayam dalam institusi- institusi formal negara, seperti pemerintah, parlemen, dan pengadilan, tetapi juga meresap dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk dalam relasi antar kelompok, organisasi masyarakat sipil, media massa, dan bahkan dalam interaksi interpersonal sehari-hari.

Memahami bagaimana struktur sosial memengaruhi distribusi dan penggunaan kekuasaan, serta bagaimana kekuasaan pada gilirannya dapat mereproduksi atau mentransformasi struktur sosial, merupakan agenda penelitian yang berkelanjutan dalam ilmu politik. Berbagai perspektif teoretis telah dikembangkan untuk mendekati hubungan yang kompleks ini, masing-masing dengan penekanan dan metodologi yang berbeda. Pada awal abad ke-21, para ahli ilmu politik terus mengembangkan dan memperdebatkan berbagai kerangka analitis untuk menjelaskan dinamika interaksi antara struktur sosial dan kekuasaan dalam konteks globalisasi, demokratisasi, dan perubahan sosial yang pesat.

Untuk memperdalam pemahaman kita mengenai isu krusial ini, mari kita telaah perspektif dari dua pemikir terkemuka di bidang ilmu politik pada era 2000-an yang memberikan kontribusi signifikan dalam menganalisis hubungan antara struktur sosial dan kekuasaan. Melalui telaah pemikiran mereka, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai berbagai dimensi dan kompleksitas dari jalinan dialektis antara bagaimana masyarakat terstruktur dan bagaimana kekuasaan beroperasi dalam ranah politik. Analisis komparatif terhadap perspektif kedua ahli ini akan membantu kita mengidentifikasi titik temu, perbedaan, serta kontribusi unik mereka dalam memperkaya khazanah ilmu

politik kontemporer.

Salah satu tokoh sentral dalam kajian hubungan antara struktur sosial dan kekuasaan pada era 2000-an adalah Michael Mann. Dikenal dengan karyanya yang monumental, *The Sources of Social Power*, Mann terus mengembangkan dan memperhalus argumennya di awal abad ke-21. Perspektif Mann menekankan pada interaksi multidimensional dari berbagai sumber kekuasaan, yaitu ideologis, ekonomi, militer, dan politik. Ia berpendapat bahwa struktur sosial terbentuk dan diubah melalui konfigurasi unik dari keempat sumber kekuasaan ini dalam konteks ruang dan waktu tertentu.

Menurut Mann, kelas sosial, sebagai salah satu elemen kunci struktur sosial, tidak secara otomatis menghasilkan kesadaran politik atau tindakan kolektif. Sebaliknya, mobilisasi politik dan pembentukan identitas kelompok sangat dipengaruhi oleh bagaimana berbagai sumber kekuasaan berinteraksi dalam konteks institusional dan historis yang spesifik. Misalnya, kekuatan ekonomi suatu kelas pekerja mungkin tidak secara langsung diterjemahkan menjadi kekuatan politik kecuali jika didukung oleh organisasi politik yang kuat dan ideologi yang mampu memobilisasi dukungan luas. Mann juga menyoroti pentingnya negara sebagai aktor otonom yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi struktur sosial melalui kebijakan-kebijakannya dan melalui kontrolnya atas alat-alat kekerasan. Dalam pandangannya, hubungan antara struktur sosial dan kekuasaan bersifat kontingen dan historis, tidak dapat direduksi menjadi determinisme ekonomi atau faktor tunggal lainnya.

Tokoh lain yang memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara struktur sosial dan kekuasaan pada periode yang sama adalah Pierre Bourdieu. Meskipun karya-karya utamanya muncul sebelum tahun 2000, pengaruh pemikirannya terus bergema dan dikembangkan oleh para sarjana di era tersebut. Konsep-konsep kunci Bourdieu, seperti modal sosial, modal budaya, dan habitus, menawarkan kerangka analitis yang kaya untuk memahami bagaimana ketidaksetaraan sosial direproduksi dan dipertahankan melalui mekanisme kekuasaan yang seringkali tersembunyi dan simbolik.

Bourdieu berpendapat bahwa struktur sosial tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan modal ekonomi, tetapi juga oleh penguasaan berbagai bentuk modal lainnya. Modal sosial merujuk pada jaringan hubungan sosial yang dimiliki individu atau kelompok, yang dapat memberikan akses ke sumber daya dan peluang. Modal budaya mencakup pengetahuan, keterampilan, selera, dan disposisi yang dihargai dalam masyarakat tertentu dan seringkali terkait dengan latar belakang kelas sosial. Habitus, di sisi lain, adalah sistem disposisi yang tertanam dalam diri individu melalui sosialisasi dan pengalaman hidup, yang memengaruhi cara mereka berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut Bourdieu, kekuasaan bekerja tidak hanya melalui paksaan ekonomi atau politik, tetapi juga melalui pembentukan habitus dan melalui dominasi simbolik, di mana nilai-nilai dan selera kelompok dominan dipaksakan sebagai norma universal. Dengan demikian, struktur sosial dan kekuasaan saling terkait erat dalam proses reproduksi ketidaksetaraan dan pemeliharaan tatanan sosial yang ada.

Melalui perbandingan perspektif Mann dan Bourdieu, kita dapat melihat bahwa meskipun keduanya mengakui kompleksitas hubungan antara struktur sosial dan kekuasaan, mereka memberikan penekanan yang berbeda pada mekanisme dan sumber-sumber kekuasaan yang relevan. Mann menekankan pada interaksi multidimensional dari berbagai sumber kekuasaan yang lebih eksplisit, termasuk peran negara dan militer, dalam membentuk struktur sosial dan dinamika politik. Sementara itu, Bourdieu lebih fokus pada peran modal sosial dan budaya, serta mekanisme kekuasaan simbolik dan pembentukan habitus dalam mereproduksi ketidaksetaraan sosial dan mempertahankan tatanan kekuasaan yang ada. Kedua perspektif ini, meskipun berbeda dalam penekanan, menawarkan wawasan yang

berharga untuk menganalisis bagaimana struktur sosial dan kekuasaan saling memengaruhi dan membentuk lanskap politik kontemporer. Pemahaman yang komprehensif terhadap hubungan ini memerlukan apresiasi terhadap berbagai dimensi kekuasaan dan bagaimana ia beroperasi dalam konteks struktur sosial yang beragam dan dinamis.

METODE | METHOD

Studi ini mengadopsi metode tinjauan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang diselidiki. Penulis merujuk pada literatur seperti jurnal dan Memuat bahan hukum primer dan sekunder. Dokumen hukum primer adalah.. mempertimbangkan teori yang relevan dengan penelitian tersebut. Artikel ini disusun berdasarkan metode tinjauan pustaka. Manuel Castells adalah seorang sosiolog yang banyak mempelajari tentang jaringan sosial dan kekuasaan di masyarakat informasi. Menurutnya, masyarakat modern telah berubah menjadi masyarakat jaringan, di mana teknologi informasi dan jaringan sosial memainkan peran penting dalam membentuk struktur sosial dan kekuasaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

HUBUNGAN STRUKTUR SOSIAL DAN KEKUASAAN TERHADAP ILMU POLITIK

a. Hubungan Struktur Sosial Terhadap Ilmu Politik

Struktur sosial adalah susunan hubungan yang terorganisir antara individu dan kelompok dalam masyarakat yang meliputi berbagai unsur seperti norma, nilai, status sosial, kelas, dan lembaga sosial. Struktur ini membentuk pola interaksi yang stabil dan berulang, serta menentukan posisi dan peran setiap anggota masyarakat. Dalam konteks ilmu politik, struktur sosial menjadi kerangka dasar untuk memahami bagaimana kekuasaan didistribusikan dan dijalankan dalam masyarakat. Struktur sosial yang terdiri dari kelas atas yang menguasai sumber daya ekonomi, politik, dan budaya, serta kelas bawah yang memiliki posisi lebih lemah, sangat memengaruhi siapa yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan bagaimana proses politik berlangsung. Dengan demikian, ilmu politik tidak bisa dilepaskan dari analisis struktur sosial karena keduanya saling berkaitan dalam membentuk dinamika sosial-politik.

Struktur sosial memengaruhi dinamika politik secara langsung karena posisi sosial yang berbeda membawa kepentingan dan pengaruh yang berbeda pula dalam sistem politik. Kelompok elit atau kelas atas yang menguasai modal ekonomi biasanya memiliki kekuatan politik yang lebih besar dalam menentukan kebijakan publik, sedangkan kelompok yang lebih rendah sering mengalami marginalisasi dan keterbatasan dalam partisipasi politik. Hal ini menciptakan ketimpangan dalam distribusi kekuasaan dan akses terhadap sumber daya politik. Oleh karena itu, struktur sosial menentukan pola partisipasi politik, konflik kepentingan, dan hasil kebijakan yang dihasilkan dalam masyarakat. Ketimpangan ini juga dapat memicu konflik sosial dan politik yang menjadi fokus kajian ilmu politik dan sosiologi politik.

Sosiologi politik menjadi bidang penting yang menghubungkan ilmu politik dengan struktur sosial. Melalui sosiologi politik, kita dapat memahami bagaimana norma, nilai, dan pola hubungan sosial membentuk perilaku politik individu dan kelompok. Sosiologi politik mengkaji hubungan antara masyarakat dan negara, termasuk bagaimana institusi politik berfungsi dalam konteks struktur sosial yang ada. Misalnya, institusi politik seperti parlemen, partai politik, dan birokrasi tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh struktur sosial yang melingkupinya. Dengan memahami struktur sosial, ilmuwan politik dapat merancang kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat, serta mengantisipasi

dampak sosial dari kebijakan tersebut.

Lebih jauh, struktur sosial juga memengaruhi jenis sistem politik yang berkembang dalam suatu masyarakat. Masyarakat dengan struktur sosial yang sangat hierarkis dan tertutup cenderung menghasilkan sistem politik otoriter atau monarki, di mana kekuasaan terpusat pada kelompok elit tertentu. Sebaliknya, masyarakat dengan struktur sosial yang lebih egaliter dan terbuka biasanya mendukung sistem politik demokratis yang memberikan ruang partisipasi lebih luas bagi berbagai kelompok sosial. Dengan kata lain, pola stratifikasi sosial dan hubungan antar kelompok dalam masyarakat berperan menentukan bentuk pemerintahan dan mekanisme pengambilan keputusan politik. Oleh karena itu, perubahan dalam struktur sosial dapat mendorong perubahan sistem politik dan sebaliknya.

Sebaliknya, kebijakan politik yang diambil oleh pemerintah juga dapat mengubah struktur sosial itu sendiri. Melalui kebijakan redistribusi kekayaan, pendidikan, dan reformasi sosial, pemerintah dapat mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan mobilitas sosial.

Kebijakan yang adil dan inklusif dapat memperbaiki struktur sosial dengan memberi kesempatan lebih luas bagi kelompok yang sebelumnya terpinggirkan.

Namun, kebijakan yang tidak adil atau represif justru dapat memperburuk ketimpangan dan memicu konflik sosial-politik. Dengan demikian, hubungan antara struktur sosial dan ilmu politik bersifat timbal balik dan dinamis, di mana struktur sosial memengaruhi proses politik, dan politik juga dapat membentuk ulang struktur sosial masyarakat.

b. Hubungan Kekuasaan Terhadap Ilmu Politik

Hubungan kekuasaan dengan ilmu politik merupakan aspek fundamental yang menjadi fokus utama dalam kajian ilmu politik. Kekuasaan dalam konteks politik diartikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi, mengendalikan, atau memaksakan kehendak kepada orang lain agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ilmu politik mempelajari bagaimana kekuasaan diperoleh, dijalankan, dan dipertahankan dalam masyarakat, serta bagaimana kekuasaan tersebut mempengaruhi hubungan sosial dan struktur pemerintahan.

Ilmu politik tidak hanya membahas kekuasaan sebagai fenomena statistik, tetapi juga sebagai proses dinamis yang melibatkan legitimasi, otoritas, dan pengaruh. Kajian ini mencakup berbagai bentuk kekuasaan, mulai dari kekuasaan formal yang dimiliki oleh lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, hingga kekuasaan informal yang dimiliki oleh elit politik, kelompok sosial, dan media massa. Dengan demikian, ilmu politik berupaya memahami bagaimana kekuasaan digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan bagaimana pengaruhnya dapat berdampak pada kebijakan publik dan stabilitas politik. Selain itu, ilmu politik juga menelaah sumber dan mekanisme kekuasaan, termasuk teori-teori klasik seperti teori kontrak sosial yang menempatkan kekuasaan sebagai hasil perjanjian antara rakyat dan penguasa, serta pandangan Max Weber yang mengidentifikasi kekuasaan sebagai kemampuan untuk mewujudkan kehendak tetap mendapat perlawanan. Pendekatan ini membantu menjelaskan berbagai bentuk legitimasi kekuasaan, baik yang bersifat tradisional, karismatik, maupun legal-rasional, sehingga ilmu politik dapat mengkaji kekuasaan secara komprehensif dan kontekstual.

Secara keseluruhan, hubungan antara kekuasaan dan ilmu politik sangat erat dan saling melengkapi. Ilmu politik berfungsi sebagai disiplin ilmu yang memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana kekuasaan dijalankan, dipertahankan,

dan diperebutkan dalam masyarakat dan negara. Melalui kajian ini, ilmu politik membantu menjelaskan struktur dan proses politik yang mempengaruhi kehidupan sosial, pemerintahan, dan pembangunan negara secara luas

KESIMPULAN | CONCLUSION

Hubungan antara ilmu politik dan struktur sosial adalah hubungan yang dinamis dan saling mempengaruhi. Ilmu politik tidak dapat dipahami tanpa mempertimbangkan struktur sosial yang mendasarinya, dan struktur sosial tidak dapat dipahami tanpa mempertimbangkan peran dan pengaruh sistem politik. Pemahaman tentang hubungan ini sangat penting untuk menganalisis dan memahami berbagai fenomena politik dan sosial, serta untuk mengembangkan solusi yang efektif bagi masalah-masalah sosial dan politik yang kompleks.

Ilmu politik dan kekuasaan memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. Ilmu politik secara inti mempelajari tentang kekuasaan, baik di dalam negeri maupun antar negara. Kekuasaan menjadi objek utama studi, karena segala bentuk interaksi politik, mulai dari pengambilan keputusan hingga kebijakan, melibatkan penggunaan dan dinamika kekuasaan.

UCAPAN TERIMAKASIH | THANK-YOU NOTE

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Edy Kurniawansyah, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pengampu mata kuliah *Pendidikan Pancasila* atas bimbingan dan arahannya selama proses penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan kelompok atas kerja sama dan kontribusinya dalam penyusunan artikel ini..

DAFTAR PUSTAKA | BIBLIOGRAPHY

- Alqadri, Bagdawansyah, Edy Kurniawansyah, and Ahmad Fauzan. "Habitiasi Nilai-Nilai Karakter Sebagai Perilaku Anti Korupsi Pada Masyarakat Kajang." *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8.1 (2021).
- Prof. Dr. Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar edisi revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Drs. H. Nursal Luth, M.M, Drs. Daniel Fernandez, M.Ant, *Sosiologi 1: untuk SMA kelas 1*, Galaxy Puspa Mega, Bekasi, 2001.
- Makalah Sosio Antropologi Pendidikan: Struktur Sosial dan Kepribadian FMIPA. <http://mirzabashiruddin.wordpress.com/2013/12/29/struktur-sosial-dan-kepribadian/>
<https://www.google.com/search?q=hubungan+ilmu+politik+dengan+struktur+sosial>, diakses tanggal 11 april 2025 pada jam 19:37
- Achmad Sanusi,.(1998), *Filsafah Ilmu, Teori Keilmuan, dan Metode Penelitian : Memungut dan Meramu Mutiara-Mutiara yang Tercecer*, Makalah, Bandung: PPSIKIPBandung.
- Achmad Sanusi, (1999), *Titik Balik Paradigma Wacana Ilmu : Implikasinya Bagi Pendidikan*, Makalah, Jakarta : MajelisPendidikan Tinggi Muhammadiyah.
- Agraha Suhandi, Drs., SHm.,(1992), *Filsafat Sebagai Seni untuk Bertanya*, (Diktat Kuliah), Bandung : Fakultas Sastra Unpad Bandung.
- Filsafat_Ilmu, <http://members.tripod.com/aljawab/artikel/filsafat_ilmu.htm>
- Is
maun,
(2001), *Filsafat Ilmu*, (Diktat Kuliah), Bandung : UPI Bandung.
- Jujun S. Suriasumantri, (1982), *Filsafah Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: SinarHarapan.
- Alqadri, Bagdawansyah, Edy Kurniawansyah, and Ahmad Fauzan. "Habitiasi Nilai-Nilai Karakter Sebagai Perilaku Anti Korupsi Pada Masyarakat Kajang." *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8.1 (2021).
- Prof. Dr. Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar edisi revisi*, Rajawali Pers, Jakarta,

2013.

Drs. H. Nursal Luth, M.M, Drs. Daniel Fernandez, M.Ant, *Sosiologi 1: untuk SMA kelas 1*, Galaxy Puspa Mega, Bekasi, 2001.

Makalah Sosio Antropologi Pendidikan: Struktur Sosial dan Kepribadian FMIPA.

<http://mirzabashiruddin.wordpress.com/2013/12/29/struktur-sosial-dan-kepribadian/>

<https://www.google.com/search?q=hubungan+ilmu+politik+dengan+struktur+sosial>, diakses tanggal 11 april 2025 pada jam 19:37

Achmad Sanusi,(1998), Filsafah Ilmu, Teori Keilmuan, dan Metode Penelitian : Memungut dan Meramu Mutiara-Mutiara yang Tercecer, Makalah, Bandung: PPSIKIPBandung.

Achmad Sanusi, (1999), Titik Balik Paradigma Wacana Ilmu : Implikasinya Bagi Pendidikan, Makalah, Jakarta : MajelisPendidikan Tinggi Muhammadiyah.

Agraha Suhandi, Drs., SHm.,(1992), Filsafat Sebagai Seni untuk Bertanya, (Diktat Kuliah), Bandung

: Fakultas Sastra Unpad Bandung.

Filsafat Ilmu, <http://members.tripod.com/aljawad/artikel/filsafat_ilmu.htm> Ismaun, (2001),

Filsafat Ilmu, (Diktat Kuliah), Bandung : UPI Bandung.

Jujun S. Suriasumantri, (1982), Filsafah Ilmu : Sebuah Pengantar Populer, Jakarta: SinarHarapa